



KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN STRATEGIS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024 DI KOTA JAMBI

Citra Darminto¹, Zakly Hanafi Ahmad², M.Wira Anshori³, dan Aditya Romadhon⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia

^{2, 3, 4}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia

Email penulis korespondensi: citradarminto@unja.ac.id

Abstract

This study analyzes the policy strategy and logistics distribution management for the 2024 Election in Jambi City, with an emphasis on pre-distribution in the preparation warehouse and post-distribution during the voting period until the recapitulation plenary. Using a constructivist interpretive paradigm and a qualitative case study approach, data were obtained through in-depth interviews, documentation studies, and field observations. They were analyzed thematically using Miles Huberman's framework and validated through source triangulation, audit trails, and member checks. Findings indicate that in the pre-distribution phase, there were still unrepresentative warehouses, low security standards, and non-compliance with standard operating procedures. In the post-distribution phase, risks increased due to ballot box hardening, plenary delays, friction between witnesses, and potential political intervention that could erode the legitimacy of the results. Logistics services are not only technical but also related to transparency and accountability of the process, which is reflected in operational indicators of timeliness and completeness, based on minutes and official documents. This study provides four strategic recommendations: first, establishing minimum warehouse specifications; second, strengthening human resource capacity and SOP compliance; third, implementing open and closed multi-layered security; and fourth, increasing transparency at the sub-district plenary level with guaranteed public access. The theoretical and practical contributions of this research are relevant for replication in semi-urban areas facing similar challenges.

Keywords: Distribution, Logistics, Management, Policy

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan manifestasi demokrasi dan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang menuntut perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan yang matang di setiap tahapan. Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum bersejarah karena pemilihan presiden/wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif di tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (KPU RI, 2023a). Desain serentak ini diharapkan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dan memperkuat sistem presidensial, namun sekaligus menambah beban teknis pada kebijakan dan manajemen distribusi logistik, khususnya dalam aspek distribusi dan pengamanan.

Dalam konteks pemilu serentak, tantangan pengelolaan logistik meningkat secara signifikan karena volume dan ragam barang logistik mulai dari surat suara, formulir, bilik, kotak suara, tinta, hingga segel bertambah secara eksponensial dibandingkan pemilu sebelumnya (Idrus, 2024). Distribusi ke ribuan TPS di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan dan semiurban, menghadapi potensi hambatan berupa kemacetan, keterbatasan armada, risiko kerusakan akibat cuaca, maupun gangguan keamanan. Prinsip *rantai kendali*, *audit trail*, dan dokumentasi serah terima di setiap titik distribusi menjadi elemen penting untuk memastikan integritas logistik tetap terjaga. Tantangan ini semakin kompleks pada tahapan

first mile (dari gudang KPU ke titik distribusi awal) hingga *last mile* (ke TPS dan kembali pasca pemungutan suara), yang memerlukan strategi manajemen yang cermat. (KPU RI, 2023b). Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi memiliki karakter semiurban yang unik. Mobilitas penduduk yang tinggi dan posisinya sebagai pusat ekonomi-politik mempermudah akses distribusi, namun juga meningkatkan risiko keterlambatan dan potensi gangguan pada jam-jam tertentu. Dengan jumlah penduduk sekitar 606.600 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan, KPU Kota Jambi bertanggung jawab terhadap pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengamanan logistik bagi 464.871 pemilih yang tersebar di 1.567 TPS (Jambiupdate, 2023). Kondisi ini menuntut penerapan kebijakan dan manajemen strategis yang efektif, khususnya pada dua tahap krusial yaitu pra-distribusi di gudang persiapan dan pasca-distribusi saat pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti tata kelola logistik pemilu dari sudut pandang yang beragam (Rostiati, 2023) menekankan urgensi penerapan kebijakan mitigasi risiko berbasis kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM)* sebagai instrumen mitigasi terhadap potensi hambatan distribusi, mulai dari keterlambatan pengiriman, kerusakan perlengkapan, hingga ancaman keamanan. Kerangka COSO ERM dipandang relevan khususnya pada tahap pra-distribusi di gudang persiapan, karena menyediakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko sehingga kualitas logistik dapat terjamin sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara. Penelitian (Delmana, 2021) mengusulkan penerapan konsep Kebijakan dan manajemen distribusi logistik dengan memanfaatkan integrasi teknologi modern dalam seluruh alur distribusi pemilu. Pendekatan ini meliputi penggunaan *Cyber Physical System (CPS)* pada tahap perencanaan, sistem penyimpanan cerdas berbasis *Radio Frequency Identification (RFID)* untuk memastikan akurasi dan transparansi stok, serta *Intelligent Transportation System (ITS)* yang dilengkapi pemantauan real-time melalui GPS. Selain itu, kinerja distribusi dievaluasi menggunakan kerangka *Supply Chain Operations Reference (SCOR)* dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Konsep ini dinilai mampu meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan keamanan distribusi, baik pada tahap pra- maupun pasca-distribusi logistik pemilu.

Penelitian (Sagala et al., 2024) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis teknologi melalui pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* yang mengintegrasikan GPS, RFID, dan sensor cerdas untuk melacak pergerakan logistik secara real-time. Inovasi ini dipandang krusial terutama pada tahap pasca-distribusi, karena memungkinkan pengawasan berlapis guna menjaga integritas logistik sepanjang proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil. Pada sisi lain, dari perspektif kesiapan fisik pra-distribusi, (Vikaliana & Purnaya, 2020) menegaskan urgensi penerapan standar minimal pergudangan logistik. Standar tersebut mencakup pengendalian suhu dan kelembaban, penataan tata ruang penyimpanan yang efisien, serta penerapan sistem keamanan yang memadai. Faktor-faktor ini terbukti berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kesiapan logistik sebelum proses pengiriman ke Tempat Pemungutan Suara.

Penelitian lainnya dari (Aglitya et al., 2025) menjelaskan tata kelola logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal melalui pendekatan analisis sentimen. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor pendukung maupun penghentian distribusi logistik, meliputi tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kualitas pengawasan di lapangan. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya dari fokus pada manajemen risiko melalui *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSOERM)* dan implementasi teknologi Logistik 4.0, hingga pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* dan standar fisik pergudangan telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan logistik pemilu, sebagian besar masih bersifat parsial dan terbatas pada salah satu aspek atau tahapan distribusi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua ranah. Pertama, fokus analitik diarahkan secara spesifik pada dua tahap krusial distribusi logistik pra-distribusi di gudang persiapan dan pasca-distribusi saat pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi dalam konteks semiurban yang melibatkan banyak aktor dan tantangan infrastruktur; fokus demikian relatif jarang dieksplor secara mendalam pada tingkat kota menengah. Kedua, penelitian yang mencakup terpenuhinya SOP dan tata kelola gudang dengan gambaran titik rawan dan pengamanan berlapis, disangga indikator operasional (ketepatan waktu dan kelengkapan, serta kerusakan/hilang) berdasarkan dokumen administratif, yang ditriangulasi dengan observasi dan analisis isi media. Kombinasi ini menghasilkan rekomendasi strategi yang aplikatif dan siap diimplementasikan (misalnya standar spesifikasi gudang, penataan area, audit berkala, penyesuaian kapasitas puncak) dan pembelajaran komparatif dari praktik daerah lain, melampaui studi yang berhenti pada deskripsi atau evaluasi umum (Latief, 2022).

Bertolak dari kebutuhan untuk menilai strategi kebijakan dan manajemen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi pada dua tahap krusial distribusi logistik Pemilu 2024 yakni pra-distribusi di gudang persiapan dan pasca-distribusi saat pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana kebijakan dan strategi manajemen pra-distribusi dijalankan, meliputi tingkat kepatuhan SOP sortir–lipat–penyimpanan, kondisi serta tata kelola gudang (akses, fasilitas, pengamanan, *quality control*), serta titik-titik rawan dan mitigasinya. Kedua, bagaimana kebijakan dan strategi manajemen pasca-distribusi diterapkan pada pemungutan suara hingga pleno tingkat kecamatan, termasuk pola pengamanan berlapis dan koordinasi lintas aktor (KPU, PPK–PPS/KPPS, PTPS/Bawaslu, Linmas, Polri–TNI, Pos Indonesia, saksi partai, Pemkot), titik rawan khususnya di TPS dan saat pengembalian ke kelurahan/PPK, serta mendorongnya terhadap tenggat waktu dan kerusakan selama proses distribusi.

Selaras dengan dua rumusan masalah, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis kebijakan dan strategi manajemen pra-distribusi di gudang persiapan KPU Kota Jambi mencakup kepatuhan SOP, kondisi/tata pengelolaan gudang, serta pemetaan titik rawan dan evaluasi mitigasinya melalui triangulasi wawancara, observasi, dan dokumen. Kedua, menganalisis kebijakan dan strategi manajemen pasca-distribusi pada pemungutan suara hingga pleno tingkat kecamatan mencakup pola pengamanan berlapis dan koordinasi lintas aktor, titik rawan (terutama di TPS dan saat pengembalian ke kelurahan/PPK). Temuan dari kedua tujuan ini menjadi dasar pembahasan rekomendasi kebijakan peningkatan efektivitas dan keamanan distribusi logistik pemilu. Untuk menegaskan fokus kajian, artikel ini menggunakan lensa kebijakan publik berdampingan dengan manajemen strategis. Dengan demikian, analisis diarahkan pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan operasional termasuk kepatuhan terhadap SOP, efektivitas koordinasi lintas-aktor, dan mitigasi risiko pada fase pra-distribusi dan pasca-distribusi logistik Pemilu 2024 di Kota Jambi. Penegasan istilah ini tidak mengubah substansi temuan, melainkan memastikan hasil kajian berkontribusi sebagai rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menghasilkan gambaran tebal tentang strategi kebijakan dan manajemen KPU Kota Jambi pada fase pra-distribusi dan pasca-distribusi logistik Pemilu 2024, kasus dipilih secara *purposive critical case* karena kompleksitas distribusi logistik dan keterlibatan multiaktor selama Pemilu 2024 (Creswell, 2017; Denzin, N. K.; Lincoln, 2017).

Target/Subjek Penelitian

Unit informasi meliputi pimpinan dan staf teknis KPU Kota Jambi, termasuk juga beberapa mantan penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* (PPK, PPS, KPPS) pada pemilu 2024 yang lalu, serta pemberitaan media massa online seperti Detik, Jambi Ekspres, Tribun, dsb.

Prosedur Penelitian

Kegiatan lapangan dilaksanakan di Kota Jambi sepanjang Juni–Juli 2025, berpusat di Kantor KPU Kota Jambi, dengan tahapan pemetaan kasus dan penelusuran dokumen pra-distribusi (PKPU/Keputusan KPU, SOP, log rute armada logistik), pendalaman pasca-distribusi melalui telaah C-Hasil, D-Hasil Kecamatan, dan dokumen pengembalian logistik, wawancara multipihak untuk verifikasi silang temuan setiap tahap termasuk mekanisme pengawasan, konsolidasi kronologi dan matriks aktor, peran, dan keputusan.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara semi-terstruktur dengan pemilihan informan menggunakan *maximum variation* hingga tercapai kejenuhan data (Guest et al., 2006), kajian dokumentasi atas sumber tertulis primer dan sekunder yang relevan, dan analisis isi pemberitaan media daring terkait kejadian di tempat pemungutan suara dan lokasi pleno. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, berita acara serah terima, log distribusi, dan berita acara rekapitulasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menurut model Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2017). pengumpulan data, reduksi/kondensasi data, display data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang berlangsung siklik. Temuan disajikan dalam tema-tema kunci lintas fase pra-distribusi dan pasca-distribusi serta matriks aktor keputusan sebagai bentuk display data. Untuk data dokumentasi/media, digunakan analisis isi guna memetakan insiden/deviasi prosedural dan respons aktor. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan mencocokkan hasil wawancara, dokumen resmi/berita acara, dan pemberitaan media; dilengkapi member check dan diskusi teman sejawat bila diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyoroti kebijakan dan manajemen strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi pada dua tahap krusial distribusi logistik Pemilu 2024, yaitu pra-distribusi di gudang persiapan dan pasca-distribusi saat pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi. Analisis difokuskan pada bagaimana strategi direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi di setiap tahap, dengan mempertimbangkan faktor pendukung, hambatan, dan tingkat kepatuhan terhadap SOP yang berlaku. Pemaparan dilakukan secara tematik berdasarkan hasil wawancara, kajian dokumentasi, dan observasi lapangan. Pada tahap pra-distribusi, fokus pembahasan meliputi pengelolaan gudang, penjadwalan, pengamanan, dan mitigasi risiko. Sementara pada tahap pasca-distribusi, analisis diarahkan pada mekanisme pengamanan di TPS, pengembalian logistik, serta koordinasi lintas-lembaga pada pleno rekapitulasi, yang selanjutnya dihubungkan dengan kerangka teori dan studi terdahulu.

Resiko keamanan logistik pemilu tidak semata-mata terkait ancaman eksternal seperti pencurian atau sabotase, tetapi lebih dominan bersumber dari kelemahan internal pada fase penyimpanan dan pra-distribusi. Hasil survei menunjukkan mayoritas satuan kerja KPU belum memiliki gudang permanen, sementara banyak gudang yang digunakan berlokasi di kawasan rawan banjir, kebakaran, atau minim fasilitas pengamanan standar. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan, kekurangan, maupun pertukaran surat suara dan perlengkapan vital lainnya sebelum mencapai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Celah kerentanan semakin melebar karena belum adanya definisi baku mengenai kriteria logistik rusak, sehingga menimbulkan tafsir beragam di lapangan dan berpotensi menjadi pintu masuk praktik manipulasi. Dengan demikian, titik kritis keamanan logistik justru terletak pada kualitas tata kelola gudang, standar operasional sortir dan lipat, serta mekanisme kontrol mutu yang hingga kini belum terbangun secara seragam di seluruh daerah (Rostiati, 2023):

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tata kelola gudang logistik pemilu masih menjadi salah satu titik kritis penyelenggaraan. Penelitian dari (Hidayat et al., 2020) menekankan bahwa aksesibilitas gudang dan kesiapan penyimpanan di Riau sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi logistik Pemilu 2019, khususnya di daerah dengan infrastruktur terbatas. Penelitian lainnya dari (Robi Ulzikri et al., 2021) turut memperkuat temuan tersebut melalui studi di Pringsewu, yang menemukan bahwa kerusakan dan kesalahan distribusi surat suara banyak dipicu oleh lemahnya proses sortir dan standar gudang yang tidak memadai. dalam evaluasi kebijakan logistik Pemilu 2020 di Tomohon menunjukkan bahwa penerapan standar penyimpanan sesuai pedoman KPU RI dapat menurunkan risiko keterlambatan dan meningkatkan keandalan distribusi. Lebih lanjut, dalam (Aglitya et al., 2025) membahas penggunaan analisis sentimen publik terhadap distribusi dan pengemasan logistik Pemilu 2024 di Tegal, yang mengindikasikan bahwa konsistensi dalam pengelolaan gudang dan sistem pengemasan berpengaruh pada persepsi efektivitas logistik. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi gudang logistik pemilu tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga tata kelola proses sortir, pengemasan, dan distribusi berkesinambungan untuk menjamin kualitas serta integritas logistik pemilu.

Gambaran gudang logistik di Kota Jambi saat Pemilu 2024 secara visibilitas pada gambar 1.1, terlihat adanya sidak dari Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan kesiapan logistik Pemilu 2024, yang dilakukan langsung oleh PJ Walikota Jambi, Sri Purwaningsih (Ahmadi, 2024). Kondisi gudang logistik Kota Jambi pada Pemilu 2024 menjadi dimensi risiko yang terlihat nyata, khususnya pada pemilihan lokasi gudang logistik utama Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang berlokasi di sebuah gudang serba guna di Kecamatan Paal Merah. Berdasarkan evaluasi pasca pemilu 2024, lokasi ini dinilai kurang representatif sehingga ketika Pemilihan Kepala Daerah 2024 lokasi ini tidak digunakan lagi, apabila ditelaah dari sisi keamanan akibat cuaca maupun kenyamanan operasional. Posisi gudang yang terlalu

masuk ke area permukiman warga, jalanan yang cukup sempit, dan tidak teraspal dengan baik berimplikasi pada keterbatasan akses mobilisasi armada besar dan potensi gangguan keamanan lingkungan.



Gambar 1. Pj. Walikota Jambi, tinjau kesipan logistik di gudang KPU Kota Jambi

Secara fisik, kondisi bangunan dinilai tidak modern, selain itu dinding dan atap gudang terlihat hanya terbuat dari seng dan pondasi kerangka besi, sehingga jika ditelaah lebih lanjut ini menunjukkan kelemahan struktural yang signifikan khususnya ini menjadi masalah apabila terjadi hujan badai atau angin kencang yang berpotensi merusak gudang logistik. Fasilitas pendukung seperti ruang istirahat petugas, pintu masuk, dan kamar mandi juga tidak memadai serta terlihat kurang terawat, sehingga dapat memengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja tim logistik. Gudang ini berposisi sebelah lapangan futsal yang juga asset pemilik gudang, sehingga logistik yang tidak cukup di gudang utama, digeser ke lapangan futsal semi terbuka yang berpotensi menimbulkan masalah baru.



Gambar 2. Lapangan Futsal Samping Gudang Menjadi Tempat Kotak Suara

Pemilihan lokasi gudang di Paal Merah sebenarnya bukan tanpa alasan. Pada saat tahapan persiapan logistik Pemilu 2024, gedung milik pemerintah daerah yang lebih representatif, seperti Gedung Olahraga Rakyat di kawasan Kota Baru yang sedang dalam proses renovasi saat itu, sedangkan beberapa gedung lain tidak memiliki kapasitas ruangan maupun luas yang memadai untuk menampung volume logistik Pemilu 2024. Akibatnya, KPU Kota Jambi harus memilih opsi gudang Paal Merah sebagai solusi akhir, meskipun terdapat kelemahan struktural dan fasilitas. Permasalahan pergudangan logistik di Kota Jambi menunjukkan adanya risiko kombinatif, baik yang bersifat laten berupa keterbatasan kapasitas fisik dan desain bangunan, maupun yang bersifat aktif akibat kelalaian dalam penerapan SOP penataan, penyimpanan, dan pengamanan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya akurasi distribusi, menurunkan tingkat ketepatan waktu pengiriman (*On-Time, In-Full*), serta meningkatkan rasio kerusakan (*loss/damage rate*).

Studi perbandingan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dan Bogor memberikan gambaran kontras. Depok menggunakan gudang tipe *distribution warehouse* yang memenuhi standar minimal lantai beton padat, pencahayaan 200 lux, kelembaban relatif <60%, suhu terkontrol 8–25°C, serta penggunaan palet kayu atau plastic, sehingga mampu menjaga kualitas logistik. Sebaliknya, Bogor hanya memanfaatkan lantai gedung pemerintah daerah tanpa dukungan fasilitas standar industri, sehingga rawan terhadap kerusakan, keterbatasan ruang, dan tata letak yang kurang efisien (Vikaliana & Purnaya, 2020). Berdasarkan temuan tersebut, Jambi dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan Depok dan kelemahan Bogor. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi: pertama, penggunaan gudang dengan spesifikasi industri yang memenuhi standar minimal infrastruktur dan lingkungan; kedua, penataan area sortir, reject, dan penyimpanan secara sistematis; ketiga, penerapan audit internal secara berkala terhadap SOP pergudangan; serta keempat, penyesuaian kapasitas gudang dengan proyeksi volume logistik pada masa puncak pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat integritas dan keandalan kebijakan dan manajemen distribusi logistik pemilu di Kota Jambi maupun daerah lain dengan kondisi serupa.

Koordinasi pengiriman logistik diawali pasca tahapan pengemasan logistik di gudang sudah selesai dan siap untuk distrbusikan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai pelaksana teknis utama bekerjasama dengan Pos Indonesia sebagai armada yang mengangkut logistik, mulanya mobil logistik dikawal oleh personel Polresta Jambi bersama unsur TNI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPKD) menuju ke gudang kelurahan tujuan.

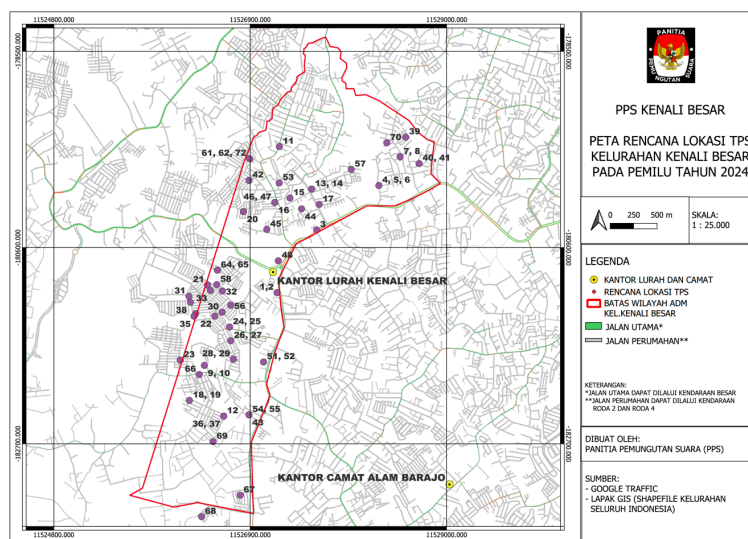
Sistem pengawalan logistik ini mengombinasikan pengamanan terbuka sebagaimana telah dijelaskan diatas dan sistem pengamanan tertutup berbasis intelijen serta pengawasan di titik-titik tertentu sepanjang rute distribusi. Pola pengamanan tersebut tidak hanya diterapkan pada tahap pengiriman logistik dari gudang KPU Kota Jambi menuju gudang logistik kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga pada tahap pengembalian logistik dari TPS ke gudang atau lokasi pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pengawalan ini dirancang untuk memitigasi potensi masalah logistik pasca-pemungutan suara, khususnya saat mengangkut surat suara hasil pemungutan yang memiliki legitimasi hukum sebagai wujud kedaulatan rakyat. Tahap ini memiliki risiko pengamanan yang lebih tinggi, terutama terkait kerusakan kotak suara yang berimplikasi pada surat suara akibat kebocoran air hujan bencana alam, dan kerusakan dokumen akibat kelalaian petugas seperti kotak suara terjatuh, atau kotak yang tidak terkunci dengan sempurna. Adapun gambaran tahapan distribusi logistik sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Prosedur Distribusi Logistik Pemilu 2024

No	Tahapan Distribusi	Standar Operasional Prosedur
1	Pengiriman dari Gudang Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ke Gudang Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan jumlah & kondisi logistik sesuai berita acara; 2. Penyegehan kotak logistik dengan segel resmi KPU; 3. Penandatanganan berita acara serah terima logistik dari KPU ke PPK; 4. PPK dan Panwascam mengawal kendaraan logistik hingga sampai ke gudang logistik kelurahan.
2	Serah Terima Logistik di Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan jumlah & kondisi logistik sesuai berita acara; 2. Penandatanganan berita acara serah terima logistik dari PPK ke PPS.
3	Distribusi Logistik ke Lokasi Tempat Pemungutan Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian rute distribusi ke TPS; 2. Pelaksanaan distrbusi logistik oleh PPS bersama PPKD ke TPS; 3. Pemeriksaan jumlah & kondisi logistik sesuai berita acara; 4. Penandatanganan berita acara serah terima PPS ke KPPS diawasi oleh PTPS.
4	Pemungutan Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan jumlah logistik oleh KPPS bersama PTPS, khususnya surat suara dan dokumen lainnya di dalam kotak; 2. Penataan letak logistik di TPS;

<p>5 Pasca Pemungutan Suara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan jumlah logistik, sebelum di kemas kembali kedalam kotak; 2. Pengiriman logistik kembali ke kelurahan; 3. Penandatanganan berita acara serah terima KPPS ke PPS di kelurahan.
<p>6 Rapat Pleno Kecamatan hingga selesai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman logistik ke lokasi rapat pleno kecamatan untuk direkapitulasi bersama saksi; 2. Logistik berada dilokasi hingga pleno berakhir; 3. Logistik dikirim kembali ke KPU Kota Jambi dari kecamatan; 4. Penandatanganan berita acara serah terima PPK ke KPU Kota Jambi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alur distribusi logistik dimulai dari gudang utama menuju TPS dan setelah proses pemungutan serta penghitungan suara berakhir logistik tersebut dikembalikan ke gudang utama KPU Kota Jambi. Dari rangkaian tahapan ini, analisis risiko menunjukkan adanya dua titik rawan yang paling berpotensi menimbulkan permasalahan, yaitu ketika logistik berada di TPS dan ketika logistik dikembalikan ke kelurahan. Meskipun prosedur rantai kendali telah dijalankan dengan menggunakan peta rencana lokasi TPS serta jalur yang ditentukan, potensi gangguan tetap ada. Kemungkinan terburuk meliputi kotak suara hilang di perjalanan akibat intervensi pihak tidak bertanggung jawab, dokumen hasil rusak karena banjir atau cuaca ekstrem, hingga keterlambatan pengiriman kembali yang dapat menghambat pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan. Situasi ini pada gilirannya dapat merusak legitimasi pemungutan suara, terutama jika berita acara hasil penghitungan tidak tiba tepat waktu atau ditemukan kerusakan pada kotak dan segel akibat proses pengiriman.



Gambar 3. Peta Rencana Lokasi Tempat Pemungutan Suara Kelurahan

Sejumlah kasus di lapangan memperkuat kerentanan tersebut. Misalnya, di TPS 23 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, terjadi konflik antara tim sukses salah satu kandidat dengan penyelenggara, yang mengakibatkan Ketua RT mengalami luka di kepala dan seorang petugas KPPS patah tangan (Detik, 2024). Insiden serupa muncul di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ketika Ketua PPK melempar mikrofon dan kursi karena emosi saat dipertanyakan mengenai perbedaan data dan absensi pemilih (Jambi24Jam, 2024). Bahkan terdapat laporan saksi partai yang dihalangi masuk ke TPS akibat tekanan massa, sehingga publik semakin menaruh curiga terhadap lemahnya pengawasan logistik di tingkat bawah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa potensi gangguan keamanan tidak hanya menyangkut logistik secara fisik, tetapi juga berhubungan erat dengan dinamika sosial politik yang menyertai proses pemungutan suara.

Untuk mengantisipasi berbagai skenario kerawanan, KPU Kota Jambi bersama aparat keamanan dan Bawaslu menerapkan pola pengamanan berlapis. Sejak logistik berada di TPS, pengawasan dilakukan

dengan melibatkan petugas Linmas, intel kepolisian yang berpatroli keliling, serta pengawas TPS (PTPS) yang mendokumentasikan setiap tahap serah terima. Prinsip utamanya, kotak suara tidak boleh dipisahkan dari rangkaian distribusi dan harus dicatat secara administratif. Di sisi lain, disusun skenario darurat berupa relokasi TPS akibat banjir, penggunaan moda distribusi alternatif (misalnya pemindahan dari tenda ke gedung serbaguna), serta penyediaan segel tambahan untuk memperkuat aspek keamanan. Langkah mitigasi ini dilengkapi dengan pemetaan rute logistik secara rinci, mulai dari gudang utama KPU menuju kantor camat, diteruskan ke kantor lurah, hingga sampai ke TPS. Pemetaan mempertimbangkan aksesibilitas jalan, kondisi infrastruktur, potensi titik rawan kemacetan maupun banjir, serta jarak tempuh agar distribusi berjalan efisien dan tepat waktu. Dengan kombinasi pengamanan berlapis dan pemetaan rute yang sistematis, risiko keamanan logistik dapat ditekan melalui dinamika politik di lapangan yang kerap menambah kompleksitas.

Setelah logistik tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), risiko keamanan justru meningkat karena terjadi penumpukan kotak suara dari banyak TPS dalam waktu hampir bersamaan. Potensi permasalahan pada tahap ini mencakup kesalahan penempatan kotak, manipulasi isi selama penyimpanan di gudang dengan fasilitas terbatas seperti aula kecamatan atau ruko sewaan, hingga intervensi antara aktor politik yang mengawasi pleno. Jika pengamanan longgar, konsekuensinya dapat berupa tuduhan kejahatan, delegitimasi pleno, bahkan konflik fisik. Secara normatif, pleno di tingkat kecamatan merupakan forum transparansi, di mana C-Hasil Plano dibuka dan ditampilkan di hadapan saksi partai politik sebelum diakumulasikan dalam D-Hasil Kecamatan. Namun praktik di lapangan menunjukkan forum ini sarat ketegangan.

Sebagai contoh di Kecamatan Alam Barajo, misalnya, pleno berlangsung jauh melebihi batas waktu; dari 333 TPS, hingga 26 Februari 2024 baru 95 TPS (29%) selesai dihitung, sementara sisanya baru rampung melewati batas pleno tingkat kota pada 5 Maret 2024 (Jambi Ekspres, 2024). Kasus serupa terjadi di Kecamatan Paal Merah yang sudah dimulai pleno sejak 17 Februari 2024, tetapi kendala kendala teknis dan terjadi antar Saksi sehingga tidak selesai dalam jangka waktu sepuluh hari sebagaimana diharapkan (BeritaSatu/JambiLink, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan logistik tidak hanya terkait perlindungan fisik kotak suara dan dokumen, tetapi juga mencakup dinamika sosial-politik di ruang pleno. Rekapitulasi yang melebar hingga 10–15 hari menyebabkan logistik tersimpan lebih lama dalam situasi rawan, meningkatkan peluang intervensi, manipulasi, maupun kesalahan pencatatan akibat kelelahan petugas. Selain itu narasi dari media lokal hingga nasional mengenai keterlambatan, ancaman, hingga indikasi penyuaan terhadap penyelenggara semakin memperkuat persepsi publik akan lemahnya kontrol.

Sebagai langkah antisipasi, Polisi Resor Kota Jambi dan Kodim 415 Jambi menempatkan personil tambahan pada gudang kecamatan yang memiliki tingkat dinamika dan konflik yang tinggi seperti Alam Barajo, Paal Merah, dan Kota Baru, sementara dari sisi Pemerintah Kota Jambi melakukan inspeksi untuk memastikan fasilitas penyimpanan logistik aman. Panitia Pemilihan Kecamatan bersama Panitia Pengawas Kecamatan memastikan dan menjaga alur dokumentasi yang lengkap, meliputi berita acara penerimaan, pencatatan waktu, hingga dokumentasi visual C-Hasil dari setiap Tempat Pemungutan Suara. Dengan kombinasi pengamanan fisik, pengawasan berlapis, serta pencatatan administratif yang transparan, risiko manipulasi maupun kehilangan logistik dapat ditekan, meskipun beban distribusi dan rekapitulasi di tingkat kecamatan relatif berat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi memiliki dua tahapan yang paling krusial dan berisiko tinggi, yaitu tahap pra-distribusi di gudang persiapan dan tahap pasca-distribusi ketika logistik digunakan dalam pemungutan suara hingga pleno di tingkat kecamatan. Pada tahap pra-distribusi, kelemahan utama terletak pada keterbatasan kapasitas gudang, standar keamanan yang belum memadai, serta kondisi fisik bangunan yang tidak sepenuhnya mendukung fungsi penyimpanan. Kelemahan ini menimbulkan risiko kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan yang dapat berdampak langsung pada kesiapan logistik menjelang hari pemungutan suara. Sementara itu, tahap pasca-distribusi memperlihatkan tingkat kerentanan yang lebih besar. Risiko tidak hanya terkait dengan aspek teknis pengembalian kotak suara dari tempat pemungutan suara menuju kelurahan dan kecamatan, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan politik. Penumpukan kotak suara di gudang sementara kecamatan, keterlambatan pleno, gesekan antar saksi, hingga potensi manipulasi dan intervensi politik menjadi gambaran nyata tantangan pada tahap ini. Situasi tersebut menegaskan bahwa

ancaman terhadap keamanan logistik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melekat pada proses transparansi dan legitimasi hasil pemilu di ruang pleno.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan distribusi logistik pemilu harus dipandang sebagai suatu rantai kendali yang terintegrasi, melibatkan aspek teknis, kelembagaan, dan sosial-politik secara bersamaan. Kolaborasi antarlembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah, terbukti menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas logistik. Namun, fakta lapangan juga memperlihatkan perlunya penguatan standar gudang, perencanaan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengawasan dan pengamanan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan kajian tata kelola logistik pemilu sekaligus rekomendasi praktis berupa model strategi distribusi dan pengamanan yang dapat direplikasi pada daerah semiurban lain yang memiliki tantangan serupa dengan Kota Jambi.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut. Rekomendasi pertama menetapkan penetapan standar gudang logistik, di mana Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi perlu memastikan lokasi memenuhi syarat penyimpanan minimal, seperti lantai beton, ventilasi baik, kelembaban terkontrol, serta keamanan berlapis melalui pagar, CCTV, palet, dan akses terbatas. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas perwakilan masyarakat, misalnya gedung olahraga atau balai pertemuan, sebagai gudang cadangan. Kedua, terkait peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Standar Operasional Prosedur, petugas *ad hoc* di tingkat kecamatan dan desa harus memperoleh pelatihan teknis khusus mengenai rantai kendali logistik, simulasi darurat, serta pengamanan etika. Prosedur operasional standar pengemasan, penyortiran, dan dokumentasi juga perlu diperketat dengan pengawasan langsung dari pengawas pemilu dan aparat keamanan.

Ketiga, penguatan pengamanan terbuka dan tertutup, dengan memastikan distribusi logistik dikawal aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, linmas, dan pengawas secara simultan di setiap titik distribusi. Sistem intelijen dan patroli keliling perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk mengantisipasi ancaman keamanan maupun intervensi politik sejak dini. Keempat, terkait transparansi dan akses publik di pleno kecamatan, forum pleno perlu diatur lebih disiplin dengan tindakan waktu, sistem antrean dokumen yang ketat, serta jaminan akses publik melalui dokumentasi visual dan laporan real-time. Gudang logistik di sekitar lokasi Pleno juga harus dijaga ketat oleh aparat gabungan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, pengawas pemilu, dan pemerintah kecamatan. Dengan demikian, aspek keempat ini saling melengkapi untuk menjamin keamanan, keutuhan, dan keterbukaan proses logistik pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pendanaan untuk penelitian dosen pemula dari Universitas Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas komitmen dan dukungan yang memungkinkan penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di lapangan.

REFERENSI

- Aglistya, A. A. P., Zainudin, A., & Widodo, A. S. (2025). Logistics Governance of the 2024 General Election in Tegal Regency: A Sentiment Analysis of Distribution and Packaging Effectiveness. *Potret Pemikiran*, 29(1), 23–51.
- Ahmadi, A. (2024). Pj Wali Kota Jambi Sidak KPU dan Gudang Logistik: Pastikan Pemilu 2024 Lancar! *Jambione.Com*. <https://www.jambione.com/megapolitan/1363726631/pj-wali-kota-jambi-sidak-kpu-dan-gudang-logistik-pastikan-pemilu-2024-lancar>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Delmana, L. P. (2021). Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>

- Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed). SAGE Publications.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Hidayat, N., Putra, A. K., Sintiya, B., Guswanti, C., & Sihotang, N. E. (2020). Accessibility of 2019 Election Logistics (Study: Procurement and Distribution of Election Logistics in Riau Province). *Journal of Election and Leadership*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.31849/joels.v1i1.3426>
- Idrus, P. G. (2024, September 2). Pemilu dari Tantangan Logistik Hingga Kebingungan Banyaknya Kertas Suara. *Benarnews.Org*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pemilu-tantangan-logistik-kertas-suara-02092024161950.html>
- Jambiupdate. (2023, June 21). Segini DPT dan Jumlah TPS Kota Jambi Pemilu 2024. *Jambiupdate.Co*. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/06/21/107092/breaking-news-segini-dpt-dan-jumlah-tps-kota-jambi-pemilu-2024/>
- KPU RI. (2023a). *Pemilu Serentak Tahun 2024, Catatan Sejarah Indonesia di Kepemiluan Global*. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11868/pemilu-serentak-tahun-2024-catatan-sejarah-indonesia-di-kepemiluan-global>
- KPU RI. (2023b, November). *Wujudkan Logistik Pemilu 2024 Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel*. Kpu.Go.Id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12091/wujudkan-logistik-pemilu-2024-efisien-efektif-transparan-dan-akuntabel>
- Latief, M. I. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 27–41. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>
- Robi Ulzikri, A., Cahyadi Kurniawan, R., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108>
- Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1012>
- Sagala, J. . P., Fikri, A. F., & Vikri, A. (2024). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Transportasi Logistik Pemilu Berbasis IOT DI Indonesia. *Journal of Economic, Business, and Accounting*, 7, 8926–8937.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. (2020). Analisis Standar Minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 10(1), 48–59. <https://doi.org/10.52643/jam.v10i1.771>